



Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Membangun Asuransi Ternak dan Peternaknya, Guna Meminimalisir Kerugian Usaha dan Rentan Kecelakaan

DASAR PEMIKIRAN

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan populasi dan ketersediaan daging sapi dalam negeri. Adalah pengadaan ternak impor kemudian dihibahkan kepada kelompok peternak. Pengadaan ternak ini biasanya dilakukan untuk ternak indukan. Dalam rangka pengadaan ternak hidup tersebut, pergerakan ternak dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan dari atau ke luar negeri selalu terjadi beresiko seperti kecelakaan atau kematian. Padahal itu dilakukan atas permodalan pemerintah atau swasta murni untuk keperluan bisnis.

KAJIAN EMPIRIS

Peternak sangat beragam kemampuan memelihara hewan ternak namun seringkali pasrah, menghadapi terjadinya berbagai hal yang berpotensi merugikan usahanya. Namun Ketidaktahuan atau minim informasi tentang adanya jasa asuransi ternak dan peternaknya. Sejak 2016 asuransi peternakan terus berkembang yakni ternak sapi indukan, bakalan untuk penggemukan. Kedepan menyasar jasa asuransi komoditas hewan ternak termasuk domba kambing. Bahkan peternaknya harus mendapatkan asuransi yang mengalami resiko dalam bekerja. Asuransi merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan peternak nyaman berusaha.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Peran asuransi dalam industri peternakan sangat diperlukan karena ketenangan dalam berusaha membuat nyaman dalam usaha bidang peternakan.
2. Pemerintah harus didorong untuk mempunyai program asuransi yang bisa diterapkan disemua komoditas, karena sampai saat ini subsidi asuransi yang diberikan hanya komoditas ternak sapi pedaging.
3. Cakupan asuransi diharapkan bisa di akses 34 Provinsi terutama di lokasi sentra, disertai dengan kemudahan pendaftaran dan klaim yang diharapkan sekaligus menjadi tantangan untuk sosialisasi. Kemudahan persyaratan pelayanan melalui daring, dan tentunya tanggung jawab dari petugas Dinas Daerah, kemudian tugas keswan untuk klaim dan penentuan besarnya klaim.
4. Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran peternak untuk memitigasi risiko melalui asuransi untuk kelangsungan usahanya. Ketika fokus berusaha maka usahanya akan berlanjut dan otomatis hasil akhir yang diharapkan yaitu percepatan peningkatan populasi.
5. Diharapkan asuransi bisa terkonsolidasi dan terorganisir, karena terkait menjaga pertanggungjawaban antara pemerintah dengan praktisi.
6. Pemerintah perlu menjamin agar asuransi yang menjadi pokok oleh Dinas Daerah bisa diakses secara online karena sampai saat ini hanya pada peternak mandiri.
7. Pemerintah diharapkan merealisasikan asuransi BPIS Ketenagakerjaan karena dunia peternakan rentan kecelakaan kerja. Diharapkan pula pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk ketenagakerjaan.
8. Diharapkan anggaran pemerintah untuk program Asuransi ditambah begitupun juga komoditasnya.